

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Transformasi Ruang Di Wilayah Suburban Perkotaan: Studi Kasus Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang meliputi, Transformasi Ruang Di Kecamatan Larangan, Praktik Penataan Ruang Di Kecamatan Larangan serta Relasi Tiga Aktor (Pemerintah, Masyarakat dan Pengusaha/Investor). Terdapat point-point pembahasan yang dapat menjadi kesimpulan, point tersebut diantaranya:

1. Penelitian ini menguatkan argumentasi David Harvey yang menyatakan bahwa konfigurasi transformasi ruang di Kecamatan Larangan mengikuti aliran sirkuit kapital yang ada (primer, sekunder, dan tersier). Sirkuit-sirkuit ini terlihat dari kepenguasaan kelas kapitalis/investor, baik dalam ranah produksi dan konsumsi langsung, ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap serta ranah konsumsi. Sirkuit kapital mengakibatkan proporsi penguasaan yang tidak sama antara ketiga aktor dalam praktik tata ruang. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Larangan juga menjamin terciptanya kerangka kelembagaan yang mendukung keberadaan kekuatan kapitalis yang terus menerus mengakumulasi kapital melalui kebijakan-kebijakan tata ruang yang diputuskan melalui proses politik.
2. Praktik penataan yang ada di Kecamatan Larangan memperlihatkan dinamika ekonomi-politik. Aktor yang mewakili pemerintah, investor, dan

masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi penataan ruang. Kondisi itu menguatkan tesis Lefebvre bahwa dalam suatu ruang terdapat aspek politik. Ruang di Kecamatan Larangan sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan Kawasan Kecamatan Larangan dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.

3. Pada setiap interaksinya ketiga aktor itu selalu melewati serangkaian urban process dan proses politik. Interaksi itu menentukan bentuk penyelenggaraan praktik tata ruang yang mengarah pada relasi konfliktual atau sekadar kontestasi. Pada konteks ini, kontestasi dan konflik sebagai suatu kontinuitas dialektis dalam kerangka produksi, reproduksi, dan konsumsi ruang yang dapat berfungsi menguatkan tatanan pembangunan kota berkelanjutan. Artinya, praktik penataan ruang seyogyanya didekatkan pada tataran idealnya yaitu diadakan, diciptakan, dibentuk, direstrukturisasi, dirancang untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan seluruh penghuninya.